

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019
DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT**

Levina Barinda Widyadhana
NPP. 28.0545
*Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Politik Pemerintahan*

Email: levina.barinda@widyadhana

ABSTRACT

In Indonesia, the first confirmed case of COVID-19 was found in Depok City, West Java. As time goes by, the number of COVID-19 cases was increased significantly. Therefore, the Health Department of Depok City's role was needed to handle the spread of COVID-19 through the Implementation of Large-Scale Social Restriction in Depok City. This research aims to find out how the Large-Scale Social Restriction policy is being implemented in Depok City, inhibiting and supporting factors of the policy, as well as efforts that have been done by the government in handling the COVID-19 in Depok City.

The method used was descriptive qualitative method with deductive approach. Data was collected using interview, observation and documentation. Data analysis technique used was data reduction, data presentation and data verification. The result of this research shows that the implementation of Large-Scale Social Restriction policy was implemented well but not optimal yet. One of the inhibiting factors is the lack of discipline of Depok community in implementing the Large-Scale Social Restriction policy. Meanwhile, the supporting factors for the implementation of the Large-Scale Social Restrictions are synergy between the government agency and there are informations for the public about COVID-19.

Government of Depok City's effort to reduce the spread of COVID-19 pandemic were restricting public mobilization, undertook the raid or "GAKKUM" continuously, and increased the number of infrastructure with built emergency hospitals. At the end of this final report, the author propose some advices for the government in Depok City. Firstly, giving punishment which has a deterrent effect to the offender of the policy. Secondly, giving financial aid to COVID-19 patients, giving moral and material support to the paramedic who has an important role in handling the COVID-19 cases in Depok City.

Keywords: Policy Implementation, Large-Scale Social Restriction, COVID-19

ABSTRAK

Di Indonesia, kasus terkonfirmasi COVID-19 pertama kali ditemukan di Kota Depok, Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu, kasus COVID-19 di Kota Depok meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan peran penting Dinas Kesehatan untuk menangani penyebaran COVID-19 melalui pelaksanaan PSBB di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang sudah berjalan di Kota Depok, faktor penghambat dan pendukung kebijakan, serta upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data meliputi

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal, salah satu faktor penghambatnya yaitu kurangnya kedisiplinan masyarakat Kota Depok dalam melaksanakan aturan PSBB, sedangkan faktor pendukung pelaksanaan PSBB adalah adanya sinergitas antar instansi pemerintah dan tersedianya informasi publik mengenai COVID-19. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yaitu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat, melaksanakan “GAKKUM” atau razia secara rutin, dan menambah prasarana dengan membangun beberapa rumah sakit darurat. Pada bagian akhir Laporan Akhir ini, penulis mengemukakan beberapa saran untuk Pemerintah Kota Depok diantaranya yaitu pemerintah dapat memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelanggar kebijakan, memberikan dukungan ekonomi bagi pasien COVID-19 serta pemberian dukungan moril dan materil bagi tenaga kesehatan yang berperan dalam penanganan kasus COVID-19 di Kota Depok.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar, COVID-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Coronavirus adalah salah satu jenis virus yang termasuk dalam subfamili *Coronavirinae* dalam famili *Coronaviridae*. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019.¹ Pada tanggal 13 Januari 2020, ditemukan kasus serupa di Thailand, akhirnya COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020.² Pada tanggal 31 Maret 2020, telah dilaksanakan konferensi pers oleh Presiden Jokowi, beliau mengumumkan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan keputusan yang diambil pemerintah dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).³

1.2. Permasalahan

Provinsi DKI Jakarta merupakan episentrum penyebaran virus corona dengan jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia per tanggal 18 Oktober 2020 yaitu sebanyak 93.356 kasus.⁴ Hal ini berpengaruh kepada peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Kota Depok, khususnya para *commuter* yang bepergian dari Kota Depok ke Jakarta maupun sebaliknya. Banyaknya jumlah *commuter* berpengaruh kepada tingginya mobilitas masyarakat sehingga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Depok.

Pemerintah Kota Depok melakukan *testing* melalui Tes PCR (*Polymerase Chain Reactions*) yaitu metode pemeriksaan virus corona dengan mendeteksi DNA virus yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini terkait penyebaran virus corona di Kota Depok. Standar yang ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) dalam melakukan Tes PCR yaitu 1:1.000 penduduk dalam satu

¹ Shrikrushna et al. 2020. “A Review on Corona Virus (COVID-19)”. *World Journal of Pharmaceutical and Life Sciences* Vol.6, Issue 4, 109.

² Sumber: <https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline> diakses pada 26 September 2020.

³ Ristyawati, Aprista. 2020. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”. *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan*, Volume 3 Issue 2.

⁴ Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran> data diunggah pada tanggal 17 Oktober 2020 dan diakses pada tanggal 18 Oktober 2020

minggu. Sesuai dengan standar tersebut maka dalam satu pekan seharusnya terdapat minimal 2.300 sampel. Pada kenyataannya, pelaksanaan Tes CPR belum mencapai standar yang telah ditetapkan. Jumlah tes terbanyak terjadi pada periode 24-30 Mei 2020 yaitu sebanyak 960 sampel.

Angka terkonfirmasi COVID-19 di Kota Depok pun meningkat secara signifikan sejak diberlakukannya PSBB Proporsional yang dinilai lebih memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah. Sejak PSBB Proporsional diterapkan banyak terjadi pelanggaran perizinan bagi masyarakat untuk berkegiatan di luar rumah. Selain itu, kepatuhan warga dinilai minim dalam mematuhi protocol pencegahan penularan virus corona. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker saat berada di tempat umum.⁵

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi kebijakan, respon masyarakat terhadap PSBB maupun dampak penyebaran COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian Saiful Mujani dan Deni Irvani dengan judul Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19, menyimpulkan bahwa perilaku dan sikap pada kebijakan tersebut berhubungan dengan latar belakang perilaku politik, kepercayaan pada kemampuan pemerintah menangani Covid-19, status pekerjaan, pendapatan, pendidikan, agama, dan gender. PSBB tidak akan efektif karena jumlah warga yang harus bekerja di luar rumah sangat banyak. Sebaliknya, memberikan subsidi pada warga agar tidak bekerja selama pandemi tetapi tidak jelas kapan akan berakhir, tentu bukan kebijakan yang realistis. Untuk itu, kebijakan mengubah PSBB dengan kembali membolehkan warga bekerja seperti sebelum masa Covid-19 dan disertai protokol kesehatan yang ketat adalah solusi yang lebih realistis.⁶

Penelitian Diki Suherman mengenai Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran COVID-19 Di Indonesia Kolaborasi 5 unsur subjek atau stakeholder, yaitu: Academician (Akademisi), Business (Pengusaha), Community (masyarakat), Government (pemerintah) dan Media (Media Massa) memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁷

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aprista Ristiyawati yang berjudul Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena mayoritas masyarakat merasa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini.⁸ Sebagai sampel, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fathoni dengan judul Dampak Covid-19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM di Wiyung Surabaya mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dampak kebijakan PSBB terhadap penurunan pendapatan UMKM Wiyung. Tidak menutup kemungkinan hal ini juga dapat terjadi di daerah lain.⁹

5

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/24/13433441/penularan-covid-19-meningkat-di-depok-karena-pelonggaran-psbb-warga-abai?page=all> diakses pada tanggal 7 November 2020.

⁶ Mujani, Saiful dan Deni Irvani. 2020. Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmu Politik Vol.11 No.22*

⁷ Suherman, Diki. 2020. Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran COVID-19 Di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah Vol. II No.2*

⁸ Ristiyawati Aprista. *loc.cit.*

⁹ Fathoni, Ahmad. 2020. Dampak Covid-19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM di Wiyung Surabaya. *Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah Vol. III No.1*

Penelitian yang dilakukan oleh Wiranti, Ayun Sriatmi dan Wulan Kusumastuti yang berjudul Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19 menyebutkan bahwa ada empat faktor yang memiliki hubungan bermakna dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok. Faktor yang berhubungan yaitu faktor jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengetahuan serta sikap. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan PSBB di Kota Depok yaitu menjadikan perempuan sebagai motor penggerak kepatuhan Kebijakan PSBB, membentuk relawan Covid-19 dari masyarakat yang berpendidikan tinggi serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Covid-19.¹⁰

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Depok menggunakan indikator yang berbeda yakni menggunakan pendapat dari Van Horn dan Van Meter yang menyatakan bahwa kinerja implementasi kebijakan dapat dilihat dari enam indikator, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, hubungan antar-organisasi, disposisi implementor serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

1.5. Tujuan

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Depok beserta faktor pendukung dan penghambat dan upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Depok.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Depok, digunakan Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Teori ini menilai implementasi suatu kebijakan melalui 6 (enam) dimensi, diantaranya:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Hubungan antar-organisasi
- 4) Karakteristik Agen Pelaksana
- 5) Disposisi Implementor
- 6) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam kegiatan pengumpulan data, dilakukan wawancara kepada 6 orang yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Divisi Kebijakan pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC) Kota Depok, serta beberapa anggota masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

¹⁰ Wiranti dkk. 2020. Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pencegahan Covid-19. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol. IX Hal. 117-124*

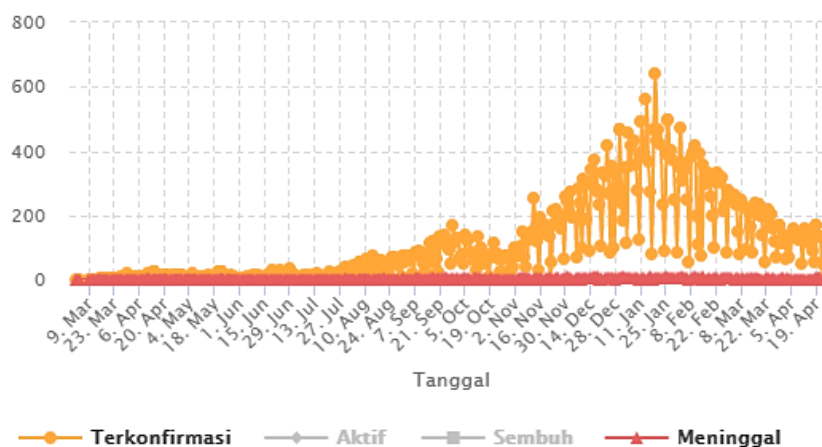
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kebijakan PSBB di Kota Depok

Proses implementasi suatu kebijakan adalah proses yang penting. Dalam penelitian ini, digunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter dengan 6 (enam) dimensi yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Mayoritas masyarakat Kota Depok telah mematuhi protokol kesehatan. Meskipun masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum masyarakat, lebih dari 90% masyarakat Kota Depok telah melaksanakan protokol kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, drg. Novarita menyatakan bahwa tidak ada target kuantitatif yang menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan PSBB. Tingkat efektivitas pelaksanaan PSBB Proporsional adalah penurunan angka kasus COVID-19 dan peningkatan angka kesembuhan di Kota Depok.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok, 2021.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa hingga saat ini, angka terkonfirmasi positif telah menurun secara signifikan sejak diberlakukannya PSBB Proporsional, meskipun angka kematian akibat COVID-19 belum menyentuh nilai 0 (nol).

2) Sumber Daya

Proses implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya berupa sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*). Data mengenai sumber daya manusia di bidang kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di Kota Depok dapat dilihat melalui tabel berikut:

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter Umum	303
2.	Dokter Spesialis	607
3.	Perawat	2171
4.	Analisis Laboratorium	260
5.	Ahli Farmasi	446
6.	Radiografer	99
7.	Tenaga lainnya	1017
Jumlah		4.966

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat selama pelaksanaan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani kasus COVID-19 di Kota Depok sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan. Sedangkan untuk sumber daya non-manusia dalam penanganan COVID-19 terdiri atas sarana dan prasarana kesehatan pendukung.

Sumber daya non-manusia dalam penanganan COVID-19 di Kota Depok berupa APD (Alat Pelindung Diri) mulai dari *nurse cap*, apron medis, pelapis alas kaki, masker dan sarung tangan. Selanjutnya Pemerintah Kota Depok menyediakan alat TCM (Tes Cepat Molekuler) yang digunakan dalam pelaksanaan test swab, ambulance obat-obatan. Keseluruhan sarana kesehatan tersebut telah disetujui penggunaannya oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Namun, pada prasarana kesehatan terdapat kekurangan yang tercantum dalam tabel berikut:

No	Rumah Sakit	Kapasitas Tersedia		Bed Occupancy Rate	
		TT ICU Covid-19	TT Isolasi	TT ICU Covid-19	TT Isolasi
1	2	3	4	5	6
1.	RS Umum Tugu Ibu	1	27	0%	59,26%
2.	RS Umum Puri Cinere	3	29	66,67%	82,76%
3.	RS Umum Hermina Depok	11	61	100%	81,97%
4.	RS Umum Meilia	3	27	66,67%	77,78%
5.	RS Umum Bunda Margonda	11	49	90,91%	87,76%
6.	RS Universitas Indonesia	23	68	95,65%	85,29%
7.	RS Umum Mitra Keluarga Depok	7	83	57,14%	65,06%
8.	RS Umum Bhayangkara Brimob	3	90	0%	73,33%
9.	RS Umum Daerah Kota Depok	10	93	80,00%	87,10%
10.	RS Umum Harapan Depok	-	15	-	46,67%
11.	RS Umum Bhakti Yudha	-	36	-	83,33%
12.	RSIA Tumbuh Kembang	-	-	-	-
13.	RS Umum Sentra Medika	-	30	-	73,33%
14.	RS Umum Grha Permata Ibu	-	27	-	59,26%
15.	RS Umum Simpangan Depok	-	3	-	100%
16.	RS Umum Hasanah Graha Afiah	-	40	100%	100%
17.	RSIA Asyifa Depok	-	1	-	0%
18.	RSIA Setya Bhakti	-	-	-	-
19.	RS Jantung Diagram	-	3	-	0%
20.	RS Umum Permata Depok	4	14	0%	57,14%
21.	RS Umum Citra Medika Depok	-	57	-	43,86%
22.	RS Umum Citra Arafiq	1	22	0%	72,73%
23.	RSIA Bunda Aliyah	-	-	-	-
24.	RS Brawijaya Bojongsari	-	-	-	-
25.	Wisma Makara UI	-	120	-	88%
26.	Pusat Studi Jepang UI	-	32	-	91%
TOTAL		81	775	77,78%	75,78%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Depok, 2021.

Berdasarkan data pada di atas dan hasil wawancara menunjukkan bahwa angka keterisian rumah sakit di Kota Depok secara keseluruhan masih berada di bawah standar WHO yaitu sebesar 77,78% untuk tempat tidur ICU (*Intensive Care Unit*) dan 75,78% untuk tempat tidur isolasi. Meski begitu masih banyak rumah sakit dan tempat isolasi yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan WHO yaitu tidak melebihi 80% dari jumlah tempat tidur yang tersedia.

3) Hubungan Antar-Organisasi

Kualitas serta frekuensi komunikasi dan koordinasi yang terjadi diantara para organisasi dari pelaksana suatu kebijakan berbanding terbalik dengan potensi kesalahan yang akan timbul dalam implementasi suatu kebijakan. Implementasi Kebijakan PSBB di Kota Depok tidak hanya melibatkan satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Depok. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing dalam pelaksanaan PSBB. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa telah terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan rutin antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan PSBB, baik secara langsung ataupun via *zoom meeting*. Berdasarkan hasil observasi penulis, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19 juga terjalin melalui website <https://ccc-19.depok.go.id/> yang menyediakan informasi publik tentang COVID-19 di Kota Depok. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga terjalin melalui *tracer* yang bertugas melakukan *tracking* kepada seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 secara langsung, biasanya melalui telepon.

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Depok ada dalam Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.27/360/Ktps/Dinkes/Huk/2020. Masing-masing organisasi perangkat daerah ditunjuk berdasarkan kompetensi di bidang keahlian masing-masing. Dinas Kesehatan Kota Depok bergerak di bidang penanganan kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab di bidang penegakan hukum. Keseluruhan pihak yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Depok telah bertugas sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku.

Karakteristik agen pelaksana tercermin dalam tingkat konsistensi dari para pelaksana yang dapat dilihat melalui kepatuhan terhadap aturan yang termuat pada kebijakan PSBB. Implementor yang memiliki komitmen tinggi akan menaati kebijakan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis secara langsung, pegawai negeri sipil Pemerintahan Daerah Kota Depok telah mematuhi aturan dalam kebijakan PSBB.

Pelaksanaan WFH ditetapkan sesuai dengan jumlah kasus terkonfirmasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ditetapkan oleh pimpinan instansi terkait. Selain itu, dalam memberikan pelayanan, di Kantor Dinas Kesehatan Kota Depok juga telah disediakan loket dengan jumlah antrian yang dibatasi dan tempat duduk yang diatur berjarak kurang lebih 2 (dua) meter untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.

5) Disposisi Implementor

a) Kognisi

Kognisi merupakan pemahaman pelaksana terhadap implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diiringi oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Pemerintah Kota Depok sebagai pembentuk kebijakan dan masyarakat sebagai objek kebijakan sudah paham mengenai poin-poin aturan dalam kebijakan PSBB walaupun masih ada beberapa masyarakat yang lalai dalam pelaksanaannya.

b) Arah Tanggapan

Penerimaan terhadap suatu kebijakan akan mendorong keberhasilan dari suatu proses implementasi kebijakan. Ada tiga arah tanggapan terhadap suatu kebijakan yaitu penerimaan,

netralitas dan penolakan.¹¹ Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa instansi pemerintah selaku implementor kebijakan PSBB bersikap menerima dan menanggapi kebijakan tersebut secara positif. Hal ini terbukti dengan sikap para implementor yang cenderung menerima kebijakan PSBB yang berlaku dan tidak terlihat adanya penolakan terhadap pelaksanaan PSBB.

c) Karakteristik Partisipasi (Masyarakat)

Masyarakat adalah objek dari kebijakan PSBB. Peran pemerintah sebagai implementor tidak cukup jika masyarakat tidak berpartisipasi, sehingga masyarakat perlu ikut serta dalam implementasi kebijakan PSBB. Ukuran partisipasi dari masyarakat Kota Depok dapat dinilai melalui kepatuhan mereka terhadap aturan PSBB.

Berdasarkan observasi serta hasil beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa oknum warga yang tidak taat terhadap kebijakan PSBB yaitu tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat Kota Depok secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 90%. Sehingga, mayoritas masyarakat kota Depok merespon kebijakan PSBB secara positif yang ditandai dengan penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari meskipun masih ada yang lalai dalam pelaksanaannya.

6) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi dan politik memiliki keterkaitan dan turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kurang kondusif akan menghambat implementasi kebijakan.

a) Kondisi Lingkungan Sosial

Manusia adalah makhluk sosial. Hal ini membuat manusia membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan sekaligus Kepala Divisi Kebijakan Satgas COVID-19 Kota Depok yaitu Drs. H. Dadang Wihana, M.Si dan salah satu masyarakat Kota Depok dapat dilihat bahwa teguran secara lisan dan sanksi sosial yang diberikan kepada masyarakat kepada masyarakat lain yang tidak menaati aturan dapat mendukung keberhasilan kebijakan PSBB.

b) Kondisi Lingkungan Ekonomi

Sejak PSBB Proporsional ditetapkan, masyarakat memiliki keleluasaan untuk kembali beraktivitas seperti bekerja dan menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan timbal balik antara pelaksanaan PSBB Proporsional terhadap kondisi kegiatan ekonomi masyarakat yang mengarah pada peningkatan laju insidensi COVID-19 di Kota Depok. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan ekonomi tidak mendukung pelaksanaan PSBB secara maksimal.

c) Kondisi Lingkungan Politik

Terkait dengan pengaruh lingkungan politik pada implementasi kebijakan, Van Horn dan Van Meter mengemukakan adanya kemungkinan pengaruh interaktif antara komunikasi antar-organisasi dan kegiatan pelaksana serta karakteristik badan pelaksana. Dalam penanganan penyebaran COVID-19, Pemerintah Kota Depok melibatkan berbagai instansi pemerintah agar upaya penanganan COVID-19 dapat dilaksanakan secara efektif.

¹¹ Situmorang, Chazali. 2016. *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: SSDI., hlm. 202.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan PSBB

1) Faktor Pendukung

a) Sinergitas Antar-Instansi Pemerintah

Pemerintah Kota Depok melalui beberapa instansi yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terus bersinergi dalam rangka menangani penyebaran COVID-19 di Kota Depok. Dasar hukum pembentukannya tercantum dalam Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.27/360/Ktps/Dinkes/Huk/2020 yang didalamnya tercantum struktur organisasi dan tanggung jawab dari masing-masing divisi. Sehingga, dengan adanya struktur organisasi yang jelas, akan memudahkan koordinasi dan pembagian tugas dari setiap instansi pemerintah yang terlibat.

b) Penyediaan Informasi Publik

Pandemi yang terjadi di Kota Depok menyebabkan masyarakat membutuhkan berbagai informasi terkait penyebaran dan penanggulangan COVID-19. Oleh karena itu, dibentuk beberapa aplikasi yang mendukung penyediaan informasi bagi masyarakat, diantaranya PICODEP dan KSC (Kampung Siaga COVID-19). PICODEP berfungsi aplikasi ini adalah khusus untuk melakukan *tracing* dan untuk memasukkan (*input*) data sedangkan KSC atau Kampung Siaga COVID-19 adalah *website* yang dibuat oleh Pemerintah Kota Depok untuk menyajikan data riil yang dapat diakses oleh publik melalui <https://ccc-19.depok.go.id/>.

2) Faktor Penghambat

a) Perilaku Masyarakat

Determinan perubahan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Upaya merubah perilaku masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan sesuai kebijakan yang berlaku bukan merupakan hal yang mudah. Sejauh ini, mayoritas masyarakat Kota Depok telah mematuhi protokol kesehatan dalam kebijakan PSBB. Namun, sebagian kecil masyarakat ditemukan masih lalai dalam pelaksanaannya.

b) Keterlibatan Sektor Swasta

Dalam proses Implementasi Kebijakan PSBB, perlu adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Depok dan para pelaku usaha agar tetap menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berlaku. Hal ini dilakukan agar lonjakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dapat berkurang.

c) Pemenuhan Prasarana Penanganan COVID-19

Sarana dan Prasarana yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan PSBB dinilai belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini disebabkan karena tingginya penambahan kasus COVID-19 di Kota Depok sehingga memicu peningkatan angka *Bed Occupancy Ratio* yang hampir menyentuh batas maksimal keterisian tempat tidur yang ditetapkan oleh WHO.

3.3. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan PSBB

1) Penerapan PSKS dan PPKM

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat adalah dengan penetapan PSKS (Pembatasan Sosial Kampung Siaga COVID-19), yaitu pembatasan pergerakan masyarakat Kota Depok dalam skala mikro di tingkat Rukun Warga (RW). Sedangkan PPKM adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yaitu suatu bentuk PSBB ketat bagi sebagian wilayah di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pelaksanaan PPKM diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021.

2) Melaksanakan GAKKUM

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok beserta aparat Kepolisian Resort Kota Depok bekerja sama dalam kegiatan “GAKKUM” atau Penegakan Hukum, dalam hal ini yaitu penerapan kebijakan PSBB. Pelaksanaan penegakkan hukum atau razia secara langsung ini bertujuan merangkul sektor informal agar terlibat dalam rangka pembatasan aktivitas usaha dan kegiatan masyarakat di luar ruangan.

3) Membangun Rumah Sakit Darurat

Peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Depok membuat beberapa rumah sakit menjadi penuh dan persentase *bed occupancy rate* menjadi tinggi. Untuk menanggulangi lonjakan kasus COVID-19 di Kota Depok, Pemerintah Kota Depok melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 akan menambah sarana dan prasarana kesehatan, yaitu berupa pembangunan rumah sakit darurat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PSBB yang dilaksanakan di Kota Depok dilihat dari enam dimensi berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter. Sebagian besar indikator dinyatakan telah sesuai dengan kriteria implementasi kebijakan sehingga Implementasi Kebijakan PSBB di Kota Depok dapat dikatakan telah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu adanya sinergitas antar-instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan COVID-19 serta adanya pengelolaan dan penyediaan informasi publik tentang COVID-19 di Kota Depok secara *online* sehingga masyarakat maupun pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memperoleh informasi yang akurat. Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan PSBB yaitu perilaku masyarakat yang belum patuh terhadap aturan PSBB. Hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah masyarakat yang masih belum mematuhi protokol kesehatan serta keterlibatan pihak swasta terutama di sektor usaha dalam pelaksanaan PSBB masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kuantitas prasarana kesehatan dalam penanganan COVID-19 berupa rumah sakit dan tempat isolasi masih perlu ditingkatkan jumlahnya mengingat lonjakan kasus mendorong tingginya angka *Bed Occupancy Ratio* beberapa rumah sakit di Kota Depok.

Dalam rangka mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan PSBB, Pemerintah Kota Depok menerapkan PSKS atau Pembatasan Sosial Kampung Siaga, yaitu PSBB dalam skala mikro (di tingkat RW). Selain itu, sejak Januari 2021 diberlakukan PPKM untuk menciptakan keseragaman peraturan tentang pembatasan kegiatan masyarakat sehingga dapat meminimalisir perpindahan masyarakat. Pemerintah Kota Depok juga berupaya membangun rumah sakit darurat untuk menurunkan *Bed Occupancy Ratio* sehingga dapat menambah kapasitas isolasi dan perawatan bagi pasien COVID-19.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Fathoni, Ahmad. 2020. Dampak Covid-19 dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM di Wiyung Surabaya. *Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah Vol. III No.1*
- Handayani, Rina Tri dkk. 2020. “Pandemi COVID-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity”. *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Vol.10 No.3*.
- Mujani, Saiful dan Deni Irvani. 2020. Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmu Politik Vol.11 No.22*

- Ristyawati, Aprista. 2020. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945". *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan*, Volume 3 Issue 2.
- Rutherford S., et al. 2020. The Pandemic and It's Impact. *Health, Culture and Society Journal* Vol.9-10, Page 3.
- Savitri, Rosnini. 2007. "Kebijakan Pembangunan Program Kesehatan Propinsi Sumatera Barat". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume II (1)*.
- Shrikrushna et al. 2020. "A Review on Corona Virus (COVID-19)". *World Journal of Pharmaceutical and Life Sciences* Vol.6, Issue 4, 109.
- Suherman, Diki. 2020. Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran COVID-19 Di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah Vol. II No.2*
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta: MedPress.
- Wiranti dkk. 2020. Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pencegahan Covid-19. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol. IX Hal. 117-124*
- Yunus, Nur Rohim. 2020. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i Vol.7 No.3*. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Komuter Jabodetabek Hasi Survei Komuter Jabodetabek 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- <https://covid19.go.id/peta-sebaran> data diunggah pada tanggal 17 Oktober 2020 dan diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.
- <https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline>, diakses pada tanggal 26 September 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 26 September 2020.
- <https://ccc-19.depok.go.id/>, diakses pada tanggal 27 September 2020.